

## RESISTENSI DAN FLEKSIBILITAS PENDUDUK PERDESAAN LAHAN KERING

*Tukiran dan Agus Sutanto\**

### Abstract

*The various forms of crises that have occurred at national and regional scale have not yet been fully felt in the dry areas, particularly in Gunung Kidul, Yogyakarta Special Province. Interesting, these rural dry areas have been very resistant and flexible in facing the impact of the economic crisis. The major factor that has made this possible is self-reliance, which was triggered by the low degree of dependence on other places for various necessities. Most of the places provide them for themselves. As far as providing basic necessities are concerned, the rural community has not yet shown symptoms of anxiety. Some saving has actually been carried out, but there is not yet any sufficient evidence of drastic decline in quality and quantity. From the beginning of the economic recession until today, saving for general (public) benefit, especially in social issues – (communalism), which is usually difficult to establish, could be easily accepted with no resistance from the community. The prospect of the rural economic sector of the dry lands can be divided into two broad categories, that is the survivor sector, and the inferior sector. The survivor sector comprises of economic activities that will continue to persist even if there is no growth, like agriculture and animal husbandry. The inferior sector on the other hand, include those activities, which are not very effective in addressing the economic crisis, and even potentially risk vanishing, like industry, trade and service sectors. The biggest impact is however, more felt in the non-economic sector, particularly those to do with services like health and family planning.*

### Latar Belakang

Sampai dengan parok akhir 1990-an, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang me- ngesankan. Tidak banyak negara yang mempunyai kinerja pertumbuhan ekonomi positif dan bahkan

---

\* Drs. Tukiran, M.A. dan Drs. Agus Sutanto, M.Sc. adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

mencapai rata-rata 7 persen per tahun, serta mempertahankan pertumbuhan tersebut dalam waktu yang cukup lama seperti Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia disebut-sebut sebagai kandidat NIC (*Newly Industrialized Country*) dari kawasan Asia. Di dalam negeri, pemerintah bahkan telah menegaskan bahwa dalam Repelita VI, sebagai babakan baru Pembangunan Jangka Panjang II, Indonesia akan memasuki tahap proses menuju lepas landas.

Akan tetapi, optimisme dan harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Mengakhiri Repelita VI sejak Juli 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi, yang melanda hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan berbagai aspek kehidupan bangsa. Krisis yang sama juga dialami oleh sejumlah negara lain di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun, pengalaman Indonesia dipandang yang terburuk dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara (Cole dan Slade, 1998: 1)

Terdapat keberagaman pendapat tentang sebab-sebab krisis moneter tersebut. Bagi sejumlah pengamat, fundamental ekonomi dan fundamental politik yang kurang sehat merupakan faktor penyebab utama (Soesastro dan Basri, 1998). Salah satu sebab internal tersebut adalah besarnya

hutang luar negeri sektor swasta yang sudah jatuh tempo, supervisi perbankan yang lemah, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terlalu tinggi. Selain itu, sebab-sebab eksternal yang mendapat sorotan adalah pasar modal yang labil dan kebijakan IMF yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia (Dieter, 1998). Karenanya, sebagian pengamat memandang bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini berlangsung di atas fundamen yang tidak sehat.

Krisis yang melanda Indonesia akhir-akhir ini dipandang sebagai representasi kelemahan basis ekonomi nasional, dan karenanya menjadi pendesak terhadap pemikiran untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap strategi pembangunan ekonomi nasional. Bias pembangunan nasional yang berorientasi pertumbuhan ekonomi menjadi stimulan semakin melebarinya kesenjangan struktur perekonomian Indonesia. Dalam jumlah relatif kecil, usaha kapitalis modern skala usaha besar dan hemat tenaga, khususnya substitusi import, dikembangkan untuk mendukung strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tersebut. Berbagai kemudahan prosedural dan birokrasi, pemberian fasilitas dan akses perbankan, subsidi dan proteksi, dan banyak hal lagi telah diberikan atas nama pembangunan.

Sementara komitmen dan intervensi pengembangan segmen terbesar ekonomi nasional berskala kecil berlangsung tidak sepenuh hati.

Krisis yang berlangsung mempertegas kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam pembangunan ekonomi berorientasi modernisasi industri padat modal tersebut, antara lain, adalah efisiensi dan daya saing yang rendah, ketergantungan akan bahan dan teknologi import yang tinggi, sifatnya yang *capital intensive* disertai penciptaan peluang kerja yang marginal, dan memperkuat dikotomi antara Jawa dan luar Jawa (Ramli, 1986).

Krisis yang berlangsung kemudian menjadi stimulan untuk mengembangkan secara transformatif ekonomi kerakyatan dan penguatan sektor pertanian yang lebih terdiversifikasi dan berorientasi komersial sehingga menjadi sektor andal dan fundamental untuk pembangunan negara. Sektor ini dipandang sebagai jalan alternatif yang dipandang esensial untuk pembangunan. Sektor pertanian dan usaha ekonomi kecil mempunyai kinerja yang dipandang lebih resistan dan fleksibel dalam menghadapi krisis, seperti ditunjukkan oleh kemandiriannya yang tinggi, ketergantungan import yang rendah, dan keunggulan komparatif yang tinggi karena berdasarkan pada sumber daya

setempat, serta pemanfaat tenaga kerja dan keahlian setempat yang tinggi.

Mendasarkan pada pembahasan tersebut, kegiatan penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan. Selain itu, penelitian semacam ini dilatarbelakangi kepedulian atas bentuk dan respons terhadap krisis yang berlangsung, perlunya memberikan kejelasan variasi dampak krisis pada berbagai sektor kehidupan, serta kesadaran akan sebab-sebab mendasar dan perlunya alternatif solusi yang dapat diterima, baik yang telah maupun yang akan dilakukan, khususnya bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah pertanian lahan kering.

#### **Daerah dan Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti halnya kenampakan fisiografis Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya, Semanu berada pada kawasan karst Gunung Sewu yang kurang subur dengan topografi relatif kasar. Selain itu, ketersediaan dan kecukupan air menjadi masalah utama bagi daerah pegunungan *calciferous* semacam ini. Sekalipun demikian, mengingat Semanu berada pada zona tengah Kabupaten Gunung Kidul, topografinya relatif datar (*plateau*), dan karena-

nya pertanian tanaman pangan relatif tumbuh lebih baik. Seperti umumnya daerah *upland*, pertanian di Semanu mendasarkan pada lahan tadah hujan (sawah *rendengan*) yang luasnya 11,8 ha dan tegal/kebun seluas 7.488,8 ha.

Kecamatan Semanu berdampingan dengan Kecamatan Wonosari, tempat kedudukan ibukota Kabupaten Gunung Kidul, berjarak sekitar 7 kilometer. Infrastruktur di Semanu berupa jalan yang kondisinya relatif baik. Wilayahnya dilintasi jalan utama kabupaten. Ibukota pusat pemerintahan Kecamatan Semanu terletak di Desa Semanu. Wilayah administratif Semanu dibagi dalam 5 desa. Empat desa lainnya masing-masing adalah Desa Pacarejo, Ngeposari, Candirejo, dan Dadapayu. Selain letaknya yang relatif terpencil, Desa Dadapayu merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Semanu yang termasuk desa tertinggal.

Secara umum kondisi ekonomi di Semanu relatif kurang. Keadaan tersebut direpresentasikan oleh kondisi fisik rumah penduduk yang sebagian besar dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, atau papan yang mencapai 81,2 persen dari 10.993 unit rumah. Selain itu, hasil rekapitulasi pendataan keluarga miskin menunjukkan bahwa 52 persen KK atau 45,48 persen jiwa termasuk dalam kategori miskin (Tabel 1). Terdapat kesesuaian antara penduduk miskin dan klasifikasi desa. Pada Tabel 1 tampak bahwa proporsi tertinggi kepala keluarga atau penduduk miskin terdapat di Desa Dadapayu yang termasuk desa tertinggal.

Penduduk Kecamatan Semanu berjumlah 55.758 orang yang terdiri atas 27.170 jiwa penduduk laki-laki dan 28.588 jiwa perempuan. Jumlah tersebut terhimpun dalam 12.872 kepala keluarga atau berarti

**Tabel 1**  
**Distribusi Penduduk Miskin menurut Desa di Kecamatan Semanu Tahun 1998**

Desa	Jumlah		Persentase kemiskinan	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Ngeposari	2047	9519	54,32	45,37
Semanu	3266	14678	34,99	29,71
Pacarejo	3815	16216	60,44	51,41
Candirejo	1761	7571	45,82	39,37
Dadapayu	1783	7874	74,20	68,66
Total	12.872	55.758	52,80	45,48

terdapat sekitar 5 jiwa per KK. Karena kondisi sumber daya wilayahnya dan keterbatasan peluang kerja lokal, migrasi dan sirkulasi keluar dari Semanu cukup besar. Indikasi ini tampak dari kelangkaan persediaan tenaga kerja pada musim puncak kegiatan pertanian (*peak season*) serta rata-rata umur petani yang di atas 40 tahun. Indikasi lainnya tampak dari besarnya jumlah pemudik yang tercatat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari kota-kota besar yang mencapai 1459 jiwa.

Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan pokok sebagian besar penduduk yang ada di daerah ini. Tanaman utama di Kecamatan Semanu adalah tanaman pangan dan palawija yaitu jagung, kedelai, padi, dan ketela pohon. Empat jenis tanaman ini adalah tanaman tradisional yang sudah lama dipraktekkan dari generasi ke generasi. Inovasi dan diversifikasi tanaman belum tampak dilakukan, hanya terbatas dalam perubahan varietas dari ke empat jenis tanaman tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh orientasi produksi yang bersifat subsistensi sehingga meskipun ada peluang pasar, diversifikasi ke arah tanaman komersial dipandang banyak mengandung risiko. Tanaman yang juga cukup penting adalah tanaman pakan ternak seperti rumput kolon-

jono (*elephant grass*) dan turi. Selain itu, tanaman tahunan (*perennial crops*) juga umum ditanam di lahan tegal dan pekarangan sebagai sumber energi bahan bakar, bahan bangunan rumah, atau sumber tambahan pendapatan.

Mengingat sifat kegiatan pertanian yang musiman dan curahan kerja yang fluktuatif, mempunyai pekerjaan sambilan nonpertanian, baik di daerah setempat maupun di luar daerah, merupakan hal yang umum dilakukan. Mempunyai pekerjaan pokok di daerah asal atau di daerah tujuan, atau sebaliknya, mempunyai pekerjaan sampingan di daerah asal atau daerah tujuan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan sebagai upaya rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang cukup berkembang di Semanu adalah kerajinan bambu (terutama sangkar burung) dan anyaman bambu, serta pengolahan tahu-tempe. Memelihara ternak kambing dan sapi juga merupakan kegiatan sampingan usaha tani di Semanu yang penting bagi ekonomi rumah tangga tani.

Kecamatan Semanu dipilih sebagai daerah sampel penelitian dengan sengaja (*purposive*). Pertimbangan yang utama adalah bahwa Semanu pernah menjadi daerah penelitian pada tahun 1994 untuk topik pekerjaan *off-farm*.

Penelitian ini tidak bersifat *re-visited*, keterkaitan dengan penelitian pertama adalah dalam pemahaman latar belakang daerah dan perkembangan yang berlangsung sehingga bisa membantu dalam mengembangkan analisis yang dilakukan.

Data yang dikumpulkan terutama adalah data primer. Data sekunder yang dikumpulkan terutama lebih difokuskan pada program-program untuk mengatasi krisis, kondisi wilayah, dan perubahan yang terjadi selama krisis. Data dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan secara berjenjang dari tingkat meso kabupaten (regional) ke tingkat mikro (individual) agar secara metodologis dapat dipadukan berbagai sumber dan beragam

persepsi terhadap dampak dan respons terhadap krisis. Nara sumber yang digali informasinya meliputi institusi pemerintah, nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan (Tabel 2). Informasi dihimpun terutama melalui diskusi kelompok secara terfokus (*focus group discussion*) dan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan daftar pokok-pokok pertanyaan (*check-list*) sebagai berikut.

#### Bentuk-Bentuk Krisis

Dampak krisis mempunyai bentuk yang bervariasi untuk berbagai sektor ekonomi, berbagai skala dan jenis kegiatan ekonomi, dan berbagai lapisan masyarakat. Secara umum penduduk perdesaan

**Tabel 2**  
**Sumber dan Cara Pengumpulan Data**

Tingkat penelitian	Nara sumber dan responden	Cara pengumpulan data dan informasi
Meso Kabupaten	Bappeda, Kandeptaker, Dinas/ Kandeperindag, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, BKKBN	FGD dan wawancara semi terstruktur
Submeso Kecamatan	Bag. Pemerintahan, Petugas Teknis Sektoral; Petugas Lapangan Penyuluhan, Petugas Sosial Kecamatan, Petugas Keluarga Berencana, Pembangunan Masyarakat Desa	Wawancara semi terstruktur
Mikro Desa	Pemerintah Desa, Kader-kader desa, antara lain, kader gizi dan kesehatan, kader pembangunan, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus kelompok tani, KUD, karang taruna.	Wawancara semi terstruktur
Mikro Individu	Petani, buruh tani, peternak, pedagang, pengrajin, tenaga kerja ter-PHK, keluarga prasejahtera	Wawancara semi terstruktur dan wawancara mendalam

menderita karena penurunan nilai tukar (*terms of trade*), namun diuntungkan oleh komoditi tanaman perdagangan yang meningkat harganya (Evans, 1998: 32). Secara sektoral, hampir semua sektor ekonomi mengalami kemunduran yang cukup berarti, kecuali pertanian dan utilitas. Sektor-sektor yang mengalami kemunduran besar, antara lain, jasa konstruksi, perdagangan, hotel, dan restoran (Colin, 1998). Dari segi skala usaha, krisis moneter lebih dirasakan oleh usaha skala besar/modern yang mempunyai kandungan import cukup tinggi. Pada gilirannya konsumen juga terkena imbas krisis karena meningkatnya harga komoditi akibat perbedaan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, kehidupan yang berbasis ekonomi uang dan konsumeristis akan merasakan dampak tersebut. Sementara itu, usaha skala kecil relatif tidak merasakan dampak seberat usaha skala besar. Begitu pula masyarakat pedesaan yang kurang bergantung pada pola hidup konsumtif dan ekonomi uang kurang terkena dampak krisis tersebut. Bahkan, usaha-usaha skala kecil yang kandungan lokalnya tinggi dinyatakan memperoleh keuntungan yang cukup berarti dari krisis tersebut, khususnya yang telah menjangkau pasar luar negeri.

Sejak Juli 1997 negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, mulai dilanda krisis moneter.

Dampak dari krisis moneter tersebut menyebabkan krisis ekonomi yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi nasional menjadi minus 10 persen. Kegiatan di sektor pertanian, manufaktur, dan jasa diperkirakan akan terpengaruh oleh krisis ekonomi tersebut. Di bidang kependudukan, terutama aspek ketenagakerjaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan diperkirakan akan terjadi hal yang sama. Pertumbuhan kesempatan kerja cenderung menyusut, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dalam segala bentuknya. Kemudian, pemanfaatan pelayanan kesehatan dan alat kontrasepsi modern semakin sulit untuk dijangkau karena biayanya menjadi mahal. Di bidang pendidikan, dalam kondisi resesi seperti ini diperkirakan angka putus sekolah akan meningkat (Manning, 1998; UNDP, 1998). Dalam keadaan seperti ini, peran pemerintah sangat penting, terutama upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut melalui berbagai program aksi yang bersifat reguler maupun khusus (Wirakartakusumah dan Yani, 1998). Berikut ini disajikan pembahasan tentang bentuk dan respons penduduk pedesaan di daerah lahan kering terhadap krisis

ekonomi kasus di Dati II Gunung Kidul.

**a. Pertanian**

Pertanian erat berkaitan dengan keamanan bahan pangan yang meliputi tiga isu utama, yaitu pasokan, baik dari produksi lokal maupun kemampuan mengimpor, distribusi, dan daya beli sebagai fungsi tingkat harga dan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pada tingkat nasional, pasokan relatif mencukupi kecuali pada sejumlah wilayah terpencil, tetapi distribusi pangan dan daya beli memburuk (Johnson, 1998: 36).

Bentuk krisis yang paling dirasakan di sektor pertanian adalah tingginya harga *input* pertanian, baik yang berupa bibit, pupuk, maupun insektisida/pestisida. Bahan baku kimiawi untuk produksi *input* pertanian yang masih merupakan bahan-

bahan import telah berdampak secara substansial pada kenaikan harga konsumen yang harus ditanggung oleh petani. Peningkatan upah buruh dan harga sewa lahan atau traktor juga dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan dampak krisis. Benih padi gogo berlabel biru dinyatakan mengalami kenaikan sebesar 90 persen. Perbandingan harga *input* pertanian lainnya disajikan dalam Tabel 3.

Selain kenaikan harga, keterlambatan pasokan *input* dari PUSKUD cukup meresahkan petani, meskipun belum berakibat pada kelangkaan persediaan yang mengkhawatirkan. Karena itu, pemangkasan jalur distribusi menjadi penting sehingga KUD bisa langsung mengelola pengadaan *input* dan mempunyai akses ke PUSRI Cilacap dipandang bermanfaat untuk segera dilakukan. Untuk daerah lahan kering, hal ini

**Tabel 3**  
**Dampak Krisis terhadap Perubahan Harga *Input* Pertanian di Semanu, Gunung Kidul 1998**

Elemen input	Harga sebelum krisis	Satuan	Harga sesudah krisis (Okt.98)
Pupuk KCL	Rp 850,00	per kg	Rp 2.500,00
Pupuk urea	Rp 500,00	per kg	Rp 1.000,0
Pestisida: furadan	Rp 2.500,00	per dos	Rp 18.000,00
Pestisida: servin	Rp 15.000,00	per kg	Rp 65.000,00
Upah buruh/ sewa traktor	Rp 7.000,00	per hari	Rp 15.000,00
Sewa tanah	Rp 80.000,00	per tahun/(± 800 m <sup>2</sup> )	Rp 100.000,00



penting karena sifat kegiatan pertanian di Gunung Kidul khas yaitu pada saat musim hujan datang, petani serentak menggarap lahan pertaniannya. Sifat serentak tersebut menuntut tersedianya *input* pertanian yang tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup memadai. Problem yang dihadapi adalah semakin langkanya barang, terutama untuk *input* pertanian. Sementara itu, untuk daerah yang aksesibilitasnya mudah dicapai, justru daya beli masyarakat terhadap barang tersebut menjadi kendala.

Respon petani akibat kenaikan harga *input* pertanian cukup beragam dan terkait dengan ketersediaan modal. Respon tersebut, antara lain, tidak menggunakan sama sekali, menggunakan hanya jika dirasa perlu, mengurangi dosis, atau mengusahakan agar dapat membeli *input* pertanian dan menggunakannya sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Selain berdampak negatif dalam *input* produksi, krisis berdampak positif terhadap harga produk pertanian. Semua jenis produk pertanian yang diusahakan petani di Semanu dinyatakan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sebagai contoh jagung mengalami kenaikan harga dari Rp 300,00 menjadi Rp 1.500,00; kedelai mengalami kenaikan harga dari Rp 2.100,00 menjadi Rp 4.750,00; dan ubi kayu basah mengalami

kenaikan harga dari Rp 250,00 menjadi Rp 725,00, dan masih banyak lagi jenis komoditi lain yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi.

Kenaikan harga komoditi pertanian berdampak cukup baik bagi ekonomi rumah tangga tani. Sekalipun demikian, peningkatan pendapatan yang diperoleh tidak tampak digunakan untuk penguatan modal usaha atau diversifikasi usaha ekonomi rumah tangga. Dampak peningkatan pendapatan justru lebih terserap untuk usaha-usaha yang cenderung bersifat konsumtif. Banyak penduduk yang membangun rumahnya ini dimungkinkan karena biaya konstruksi atau renovasi rumah tidak mengalami peningkatan yang berarti, terutama didukung harga semen yang hingga akhir Agustus 1998 relatif stabil. Selain itu, konstruksi rumah pada umumnya lebih mengandalkan kayu yang dibudidayakan penduduk di lahan tegal dan pekarangan dan tidak memerlukan besi yang harganya cukup mahal. Pada sisi lain, pembelian perabot rumah tangga dan barang-barang elektronik semakin menjadi mode sebagai simbol status rumah tangga.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa menurut tipologi strategi rumah tangga (*household strategy*) pada umumnya, penduduk petani di Semanu termasuk dalam kategori strategi konsolidasi

(*consolidation strategy*). Dalam strategi ini, menurut White (1991), petani lebih mengutamakan keamanan suplai makanan pokok. Hal ini berbeda dengan strategi akumulasi (*accumulation strategy*) yang dicirikan oleh penggunaan surplus satu kegiatan untuk memperoleh akses pada pendapatan yang lebih tinggi dari kegiatan lainnya, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian. Strategi yang paling memprihatinkan adalah strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang menempatkan petani untuk menerima setiap kegiatan ekonomi yang hampir tanpa investasi modal dan karenanya memberikan imbalan yang sangat rendah. Sektor pertanian tanaman pangan dan palawija merupakan sektor yang dipandang tetap mencukupi penghasilan rumah tangga dalam krisis ekonomi yang berlangsung tidak teredusir menjadi sekedar bertahan hidup (*survival strategy*) dengan kontribusi yang marjinal bagi ekonomi rumah tangga.

#### **b. Peternakan**

Seperti halnya di pertanian, krisis moneter mempunyai dampak positif terhadap peternakan di Gunung Kidul dalam bentuk meningkatnya harga komoditi ternak, khususnya sapi (lembu) dan kambing. Jenis sapi yang banyak dibudidayakan penduduk adalah

sapi metal dan limosin. Keduanya merupakan hasil inseminasi buatan (IB) dengan induk sapi jenis lokal. Jenis ini dagingnya tidak berlemak dan terutama untuk memenuhi kebutuhan daging hotel-hotel dan restoran di luar daerah Gunung Kidul melalui pedagang dari Tasikmalaya. Namun, akibat krisis, bibit IB menjadi sangat langka tersedia di pasaran. Karena dipandang menguntungkan, peternak menyatakan bersedia membayar tiga kali lipat (Rp 50.000,00) jika bibit IB tersedia. Sebelum krisis, IB berharga Rp 15.000,00.

Selain berfungsi untuk pupuk, ternak di Gunung Kidul merupakan tabungan (*saving*), namun belum mengarah pada investasi usaha. Ketika peternak menjual sapi dewasa, biasanya langsung membeli ternak kecil (*bakalan*) sebagai pengganti. Pada masa krisis, harga ternak meningkat cepat dan memberikan dampak yang cukup penting bagi ekonomi rumah tangga peternak. Karena cepatnya perubahan harga, petani yang tidak mengetahui informasi pasar dapat tertipu oleh pedagang yang membeli ternak dengan cara mendatangi petani di rumahnya.

Selain peningkatan harga akibat krisis, petani diuntungkan oleh musim. Pakan relatif tersedia cukup dan mudah didapat, terutama ditunjang oleh musim hujan, yakni hijauan makan ternak (HMT),

cukup panjang sehingga petani belum perlu mencari atau mendatangkan pakan ternak dari luar daerah. Pakan pada umumnya dibudidayakan sendiri di pematang (*galengan*) berupa rumput kolonjono dan pohon turi. Selain itu, jerami, *glaerecidae.sp*, dan seresah tebu juga merupakan bahan pakan ternak yang relatif mudah didapat.

Seperti halnya sapi, peternak kambing jenis *Jawa* mengalami pula dampak positif. Bibit kambing mudah didapat, pakan ternak cukup tersedia di pekarangan dan tegalan, dan harga jual mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada masa krisis. Hampir setiap rumah tangga mempunyai ternak kambing sebagai tabungan. Budi daya ternak lainnya yang sedang berkembang di Gunung Kidul adalah katak lembu (*bull-frog*). Pada masa krisis harganya mencapai Rp 14.000,00 per kilogram. Di zona selatan Gunung Kidul, nelayan-nelayan (misalnya di Sadeng, Kec. Rongkop, Kemadang di Kec. Tepus, Renean di Kecamatan Saptosari) mendapat keuntungan besar dari kenaikan harga ikan, udang, kepiting, dan lobster. Lobster yang dalam kondisi normal berharga sekitar Rp 14.000,00 ketika krisis meningkat menjadi Rp 400.000,00. *Booming* ini terjadi 4 bulan lalu, berlangsung selama satu bulan sekitar Maret—April 1998. Akhir-akhir ini, meskipun harganya masih cukup tinggi, harga lobster relatif telah

mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 75.000,00.

Dampak krisis moneter di sektor peternakan mempunyai bentuk yang berbeda untuk skala dan jenis usaha yang berbeda. Peternak tradisional yang skala usahanya kecil (rumah tangga) tidak terpengaruh krisis moneter dan bahkan dalam banyak hal diuntungkan oleh krisis. Sedangkan peternak ayam skala besar/modern, seperti PT. Agrifood di Semanu justru mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan terjadinya pengurangan pekerja dan PHK. Sumber utama kebangkrutan tersebut adalah tingginya harga pakan dan obat-obatan untuk ternak. Pakan dan obat-obatan ini pada umumnya diimport. Pakan ternak Charoen Pockphand, misalnya, diimport dari Thailand. Hal ini mempertegas kenyataan bahwa usaha-usaha skala besar kurang mempunyai kemandirian seperti ditunjukkan oleh ketergantungan struktur usahanya terhadap faktor eksternal, terutama kandungan import yang rentan terhadap pengaruh fluktuasi ekonomi makro seperti perubahan nilai tukar rupiah yang masih cukup tinggi.

### c. Industri dan Perdagangan

Seperti halnya dampak krisis terhadap sektor peternakan, bentuk dampak krisis terhadap industri cukup bervariasi menurut jenis dan

skala usaha. Secara umum, pengusaha skala menengah dan besar mengalami dampak yang kurang menguntungkan. Usaha industri batu *keprus*, misalnya, telah mengurangi skala produksi dari pengoperasian 4 mesin menjadi 2 mesin. Demikian pula pada skala industri kecil dan kerajinan rumah tangga terdapat perbedaan dampak. Industri pande besi dan cor alumunium, karena terkendala mahalannya bahan baku, mengalami penurunan produksi secara drastis, meskipun peluang permintaan pasar lokal tersedia. Bahan baku untuk para perajin pande besi mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari harga Rp 7.000,00 per kg menjadi Rp 13.000,00. Demikian pula, industri pengolahan tempe dan tahu banyak memanfaatkan kedelai import dari Taiwan, Thailand, dan USA. Selain beralih ke kedelai lokal, banyak yang melakukan penurunan produksi karena mahalannya bahan baku. Kedelai lokal selama ini banyak terserap untuk usaha industri tahu. Menurut Dinas Perindustrian, usaha pengolahan tahu-tempe mengalami pengurangan produksi sekitar 15 persen.

Dampak positif berupa peningkatan pendapatan justru dirasakan oleh usaha industri kecil dan kerajinan rakyat pengolah bahan baku setempat, terutama yang mampu menjangkau pasar luar negeri, seperti kerajinan anyaman

bambu. Di wilayah lain Kabupaten Gunung Kidul, produk-produk kerajinan dengan kandungan lokal (*local content*) 100 persen seperti produk kerajinan kayu mengalami keuntungan yang cukup berarti. Produk-produk seperti *loro-blonyo* (ukuran orang) yang terbuat dari kayu mahoni diekspor ke Singapura dengan harga Rp750.000,00 per pasang. Begitu pula produk kayu lainnya, seperti miniatur buaya dan patung tradisional mengalami transaksi yang cukup besar sekitar Rp 780 juta rupiah untuk memenuhi permintaan konsumen di Canada. Kerajinan rakyat batu ornamen bahkan baru mampu menyuplai 40 persen peluang eksport. Keterbatasan ini, antara lain, karena kurangnya tenaga terampil, kesulitan pengambilan bahan baku, dan kenaikan suku cadang yaitu mata gergaji akibat pengaruh krisis moneter.

Hambatan usaha industri kerajinan di Kecamatan Semanu adalah sifatnya yang musiman (*seasonal*). Secara umum hambatan ini berlaku pula untuk keseluruhan daerah di Gunung Kidul. Konteks musiman ini digambarkan oleh aktivitas industri kerajinan yang sangat dipengaruhi oleh kegiatan di pertanian. Ketika kegiatan pertanian memasuki masa tanam, khususnya ketika musim hujan berlangsung, para perajin akan mengesampingkan usaha industri

kerajinan dan lebih memusatkan kegiatannya pada usaha pertanian. Pola ini sudah berlangsung lama karena pengadaan bahan makanan menjadi prioritas utama. Setelah kegiatan ini selesai, baru mereka bekerja di sektor industri, walaupun hasil dari kegiatan industri ini lebih menguntungkan.

Bentuk krisis yang dirasakan oleh usaha perdagangan adalah adanya penurunan daya beli, yang berarti pula penurunan jumlah pembeli dan transaksi jual-beli. Pembeli di Kecamatan Semanu dipandang telah semakin melakukan penghematan dalam belanja. Pembelian jumlah item perdagangan cenderung semakin sedikit sehingga perputaran jumlah item barang dagangan menjadi sangat lambat. Bentuk dampak lainnya di perdagangan adalah menurunnya jumlah penghutang. Penduduk cenderung tidak lagi mudah berhutang dengan pertimbangan merasa sulit mengembalikan hutang, yang akhirnya akan menambah beban rumah tangga. Hal yang demikian juga dialami oleh usaha bank informal seperti *bank plecit*, yang menurun drastis jumlah peminjaman uang.

Praktek tukar barang (*barter*) pada umumnya telah berlangsung lama di Semanu, dan pada masa krisis ini, praktek barter semakin menguat. Dalam barter ini,

penduduk membawa barang hasil bumi seperti gaplek, kacang panjang, atau jagung ke kios atau warung untuk ditukarkan dengan barang-barang yang dibutuhkan. Barang yang ditukar pada umumnya lebih tinggi nilainya daripada barang yang diambil sehingga pembeli tidak perlu menyediakan uang tambahan. Jika nilai barang yang ditukarkan masih lebih tinggi daripada barang yang diambil, penduduk akan memperoleh pengembalian uang.

Krisis juga telah mendorong penduduk, khususnya yang ter-*PHK* dan mempunyai pesangon, untuk membuka usaha dagang (*warung*), baik di rumah maupun di pasar. Usaha-usaha baru tersebut juga mengalami dampak krisis seperti disebutkan di atas yaitu kurangnya daya beli masyarakat dan menurunnya jumlah pembeli. Meskipun kondisinya sulit dan pendapatan yang diperoleh relatif kecil, alternatif berdagang dipilih sebagai *survival strategy* karena dipandang sebagai usaha yang tidak memerlukan banyak persyaratan dan keahlian (*easy entry*). Sebagian usaha berdagang ini dilakukan di luar daerah Gunung Kidul, terutama di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Jakarta, dan daerah pinggirannya.

#### d. Ketenagakerjaan

Selama krisis berlangsung, memang ditemukan adanya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), baik yang bersifat lokal dari daerah setempat maupun dari luar Dati II Gunung Kidul. Data jumlah PHK yang pasti masih simpang siur sebagai akibat dari perbedaan pengertian PHK. Sebagai contoh, jumlah PHK dari Departemen Tenaga Kerja berbeda dengan yang dikumpulkan oleh instansi lain dalam wilayah dan waktu yang sama karena ada yang dikaitkan dengan program penanggulangan pengangguran. Cara pekerja menyikapi PHK cukup beragam. *Pertama*, sebagian kecil dari pekerja PHK kembali ke daerah asal dan kembali menekuni pekerjaan yang dilakukan sebelum merantau, seperti memanfaatkan potensi daerah yang ada, yakni kerajinan rumah tangga, seperti sangkar burung dan anyaman bambu. *Kedua*, bekerja pada sektor pertanian karena musim penghujan relatif panjang. *Ketiga*, melakukan sirkulasi kembali untuk mendapatkan pekerjaan di kota, terutama sektor informal. *Keempat*, memperbaiki pematang sawah dan mengumpulkan kayu bakar, melakukan kegiatan lain yang dipandang sangat ekonomis seperti menangkap burung. *Kelima*, menjadi peserta pengerahan tenaga kerja dari program pemerintah seperti

PDKMK, PDM-DKE, dan sejenisnya yang bersifat padat karya.

Dengan demikian, bentuk-bentuk krisis di bidang ketenagakerjaan, seperti peningkatan jumlah penganggur dalam segala bentuknya, untuk sementara belum begitu tampak mencolok. Secara umum dapat dikatakan bahwa krisis yang berlangsung sampai November 1998 belum berdampak buruk terhadap ketenagakerjaan lokal. Beberapa pekerja yang mengalami PHK lokal maupun PHK dari daerah lain sebagian besar sudah bekerja kembali. Sebagian ada yang bekerja pada pekerjaan sebelumnya dan sebagian besar dari mereka bekerja lagi pada kegiatan sektor informal, terutama di perkotaan di luar Dati II Gunung Kidul. Dengan demikian, dampak krisis ekonomi di bidang ketenagakerjaan justru lebih banyak dirasakan di perkotaan daripada di perdesaan. Mobilitas pekerja dari perdesaan ke perkotaan, meskipun volumenya cenderung menyusut karena krisis ekonomi, proses tersebut terus berjalan. Selama di perkotaan masih lebih menjanjikan harapan daripada di daerah asal, maka migrasi dan sirkulasi akan tetap dilakukan sebagai strategi untuk mendapatkan pekerjaan. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan lebih mudah daripada mereka tetap tinggal di perdesaan.

**e. Kesehatan dan KB**

Krisis moneter yang berkepanjangan ini diperkirakan akan berdampak pula pada partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan KB. Hasil diskusi pada tingkat meso dan mikro dengan Pemda Dati II Gunung Kidul menunjukkan bahwa kunjungan pemeriksaan kesehatan pada puskesmas pembantu dan puskesmas cenderung mengalami penurunan. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa kemungkinan derajat kesehatan penduduk justru bertambah baik. Meskipun demikian, hasil analisis Susenas Kor 1996, 1997, dan 1998 menunjukkan bahwa keluhan kesehatan sebagai indikator awal angka morbiditas untuk Daerah Istimewa Yogyakarta justru meningkat dari 31 persen (1996) menjadi 34 persen (1997) dan pada 1998 sekitar 37 persen, sedangkan angka nasional hanya sekitar 26 persen. Ini berarti bahwa penduduk dalam kondisi *ringkih* banyak mengalami keluhan kesehatan dan semakin tidak mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Demikian pula, tingginya harga obat-obat modern menyebabkan pula penurunan pembeli obat pada toko obat dan apotek. Hasil Susenas 1997 dan 1998 mendukung keadaan ini, menurunnya persentase pemanfaatan fasilitas kesehatan modern diikuti pula oleh peningkatan ke

cara pengobatan sendiri dari 27 persen (1997) menjadi 35 persen (1998).

Suatu hal yang memprihatinkan adalah apabila penduduk yang *ringkih* dan kurang berdaya untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan obat modern yang ada menderita sakit. Kemungkinan penduduk untuk mencari dan memanfaatkan pengobatan alternatif yakni pengobatan tradisional yang lebih murah tetap dapat terjadi. Penggunaan obat-obat tradisional tidak dapat disalahkan. Akan tetapi, apabila pengobatan tradisional gagal untuk menyembuhkan penyakit dan ketika sakitnya sudah parah baru dibawa ke pelayanan kesehatan modern, biayanya menjadi semakin tidak terjangkau.

Di bidang pelayanan kontrasepsi (KB) hampir terjadi nasib yang sama. Jenis kontrasepsi apa pun sangat mahal harganya. Sementara itu, daya beli masyarakat relatif tetap dan bahkan cenderung turun. Sebagai contoh, harga kontrasepsi susuk KB sekitar Rp 95.000,00, sebelum krisis hanya Rp25.000,00. Suntik KB sekitar Rp15.000,00 yang sebelumnya Rp2.500,00. Kontrasepsi AKDR yang dulunya gratis, sekarang mereka harus membayarnya minimal Rp50.000,00 dan bahkan ada yang mencapai Rp 250.000,00. Sama halnya dengan pil dan sterilisasi yang dulu kebanyakan diberikan secara gratis atau

dibiayai oleh organisasi tertentu, sekarang mereka harus membayar cukup mahal. Seperti halnya sterilisasi tubektomi, minimal mereka membayar Rp150.000,00. Tidak ada satu pun alat kontrasepsi yang dapat diperoleh secara gratis, kecuali kontrasepsi tradisional. Perlu diketahui bahwa di Dati II Gunung Kidul, sekitar 44 persen dari akseptor menggunakan kontrasepsi AKDR, suntik 21 persen, pil 20 persen, susuk KB 8 persen, dan sterilisasi 4 persen. Dapat diperkirakan, berapa jumlah dana yang harus disiapkan oleh masyarakat setempat apabila jumlah akseptor pada tahun 1997 diperkirakan sekitar 101.321 dari 158.586 pasangan usia subur. Tampaknya, pasangan usia subur kurang mampu pun harus mengupayakan sendiri kontrasepsi secara mandiri kalau ingin menjadi akseptor. Hasil Susenas menunjukkan bahwa prevalensi kontrasepsi mengalami penurunan dari 70 persen (1997) menjadi 66 persen (1998). Penurunan ini diperkirakan terjadi karena krisis ekonomi dan masyarakat semakin kurang mampu dalam pengadaan kontrasepsi secara mandiri. Pada saat masyarakat membutuhkan dana untuk pengadaan kontrasepsi, apakah ada alokasi dana seperti program JPS, JPKM, SPSDP, dan sejenisnya?

#### **f. Pendidikan**

Bentuk krisis di bidang pendidikan tampaknya mengalami nasib yang sama seperti masalah yang dihadapi pada bidang kesehatan dan KB. Pada saat penelitian dilakukan (awal November 1998) diskusi tim peneliti dengan Pemda mendapatkan informasi bahwa belum didapatkan siswa yang putus sekolah pada tingkat SD dan SLTP seperti yang dilaporkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan. Akan tetapi, laporan dari luar instansi tersebut menunjukkan cukup banyak siswa putus sekolah pada kedua jenjang pendidikan tersebut. Cukup sulit memang, mana di antara kedua sumber data yang lebih mendekati kenyataan di lapangan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa jumlah siswa putus sekolah berhubungan positif dengan bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan ini menyebabkan tekanan ekonomi rumah tangga akan berlangsung terus-menerus sehingga akan semakin menjauhkan penduduk dari kebutuhan nonpangan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pendidikan. Pada giliran berikutnya diperkirakan akan terjadi putus sekolah. Asumsi ini belum dirasakan, mungkin di awal atau pertengahan 1999 akan dirasakan



bilamana krisis memang akan berkepanjangan.

Gejala munculnya anak sekolah yang cepat mengantuk di kelas, pingsan pada saat mengikuti upacara, berangkat sekolah belum *sarapan*/makan pagi, yang pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi, namun saat ini sudah terjadi. Ini memberikan indikasi bahwa ada kekurangan makan, gizi, dan nutrisi pada siswa. Hal yang menarik adalah sebelum masa krisis ekonomi, ada program makanan tambahan untuk siswa TK dan SD sebagai upaya penambahan kecukupan pangan dan gizi. Pada saat ini, saat siswa memerlukan hal tersebut, justru tidak terdengar kabarnya. Pada sisi lain, tampak jelas bahwa pakaian seragam yang dipakai siswa semakin bertambah kusam, sepatu lusuh, dan siswa cenderung tidak jajan di sekolah. Warung di sekitar sekolah menjadi semakin dijauhi oleh siswa di perdesaan lahan kering. Sebaliknya, di daerah kota, banyak dijumpai warung nasi peduli untuk mahasiswa. Ini sangat ironis. Siapa yang sebenarnya harus dibantu?

#### **Respon terhadap Krisis**

Pada saat penelitian dilakukan, mulai dirasakan adanya tanda-tanda penurunan daya beli masyarakat terhadap berbagai pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Apabila

keadaan ini berlangsung secara terus-menerus, sudah barang tentu akan berpengaruh pada kehidupan penduduk. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan dan mempersiapkan strategi untuk menanggulangi berbagai bentuk krisis yang telah dan akan dialami oleh penduduk. Ini berarti bahwa baik pemerintah maupun masyarakat menganggap bahwa daya tahan untuk menyiasati krisis ekonomi terbatas. Berbagai bentuk respons dari pemerintah dan rumah tangga dalam menanggulangi krisis ekonomi adalah sebagai berikut.

#### **a. Respons Pemerintah**

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program aksi penanggulangan dampak krisis ekonomi yang lebih bersifat khusus seperti Penanggulangan Dampak Kekeurangan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Jaring Penanggulangan Kesehatan Masyarakat (JPKM), *Social Protection Development Program* (SPSDP), Program Pemberdayaan Daerah dalam mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), penjualan kebutuhan pokok dengan harga murah kepada rumah tangga miskin dan atau keluarga prasejahtera. Selain program khusus ini, pemerintah secara berkesinambungan telah mengalokasikan program yang bersifat reguler, baik yang bersifat

sektoral maupun lintassektor. Beberapa peran pemerintah dalam berbagai sektor untuk menanggulangi krisis moneter, antara lain, adalah sebagai berikut. *Pertama*, dalam rangka memperluas kesempatan kerja telah dialokasikan dana untuk penciptaan kesempatan kerja yang bersifat reguler, baik lokal, sektoral, maupun yang bersifat khusus. Cukup banyak program aksi yang telah dilaksanakan, beberapa di antaranya yang cukup dikenal oleh masyarakat antara lain adalah PDKMK, PDM-DKE, TKMT, TKT, Padat Karya, dan Inpres Dati II. Kesemuanya ditujukan untuk memacu kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja. *Kedua*, di bidang kesehatan dan KB diberikan bantuan pelayanan kesehatan dan KB secara gratis, terutama untuk rumah tangga miskin dan atau keluarga prasejahtera I. Di bidang pendidikan, bagi peserta didik yang berasal dari rumah tangga miskin/prasejahtera I, diberikan beasiswa sampai dapat menyelesaikan pendidikan 9 tahun. Ketiga, di bidang pemenuhan kebutuhan pokok, telah dilakukan penjualan bahan makanan pokok dengan harga sangat murah untuk rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera I. Di samping itu, seringkali dilakukan operasi pasar bahan makanan pokok dengan tujuan mengendalikan dan menurunkan harga agar terjangkau oleh

masyarakat setempat. Dana yang tersedia dari berbagai program khusus tersebut cukup besar dan apabila dikelola dengan tepat mengenai sasaran, krisis ekonomi tidak akan begitu dirasakan oleh penduduk lahan kering pada masa mendatang.

#### **b. Respons Rumah Tangga**

Meskipun dampak krisis belum begitu dirasakan oleh sebagian besar rumah tangga, mereka sudah merencanakan dan sebagian justru sudah melakukan pengelolaan kebutuhan dasar yang semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Bentuk respons pada rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua yakni untuk kepentingan individu dan kepentingan umum. Respons untuk keperluan individu tampak pada makanan substitusi seperti beras-jagung, peningkatan konsumsi ikan asin sebagai ganti daging dan telur, pengurangan penggunaan minyak goreng dengan merebus dan atau memanggang, serta upaya-upaya lain yang mampu mereka lakukan sebagai bentuk penghematan. Hal yang sama juga terjadi untuk pengeluaran yang bukan makanan seperti penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan, pembelian pakaian baru, dan sejenisnya.

Respons untuk kepentingan umum menyangkut terutama dalam hal sosial kemasyarakatan, seperti perhelatan yang cukup

membutuhkan biaya. Dalam keadaan resesi ini, penghematan yang biasanya sangat sulit dilakukan justru dapat dilaksanakan tanpa mendapat tantangan dari masyarakat, seperti pesta perkawinan dan perhelatan. Hal ini tampak jelas semakin sederhananya kualitas pelaksanaan perhelatan sosial-budaya, jumlah tenaga yang terlibat, dan jumlah undangan yang dihadirkan cenderung menurun, serta menurunnya frekuensi perhelatan dibandingkan dengan sebelum krisis moneter. Pada saat krisis seperti ini, justru mereka lebih realistis bersikap dalam penyelenggaraan perhelatan sosial budaya yang sebelumnya sangat sulit dilakukan.

Selain kedua bentuk respons tersebut, mereka telah menyiapkan pula bentuk pemenuhan cadangan hidup bilamana krisis ekonomi akan berlangsung lama. Bentuk cadangan hidup yang mudah untuk dilihat, antara lain, pemilikan ternak sapi, kambing, ayam, pohon besar, dan persediaan makanan jagung secara individu. Masih ada cadangan hidup yang dikelola secara sosial dan kelompok, seperti lumbung desa yakni tempat penyimpanan bahan makan, yang justru semakin berperan dalam masa krisis seperti ini. Pada sisi lain, penduduk di daerah lahan kering ini hampir semuanya adalah pekerja yang ulet, sanggup bekerja keras, dan kalau terpaksa pekerjaan

3D (*Dangerous, Difficult, Dirty*) pun dilakukan. Etos kerja ini tampak ketika PHK sedang marak. Banyak pekerja dari daerah ini terkena PHK dari berbagai perusahaan di sejumlah kota besar di Jawa. Mereka hanya pulang sebentar kemudian kembali lagi ke daerah tujuan untuk mendapatkan pekerjaan apa pun jenisnya, dan kalau terpaksa membuka usaha sendiri di sektor informal.

Respons terhadap krisis ekonomi menunjukkan tingkat kemandirian ekonomi rumah tangga desa yang cukup tinggi. Penduduk pedesaan lahan kering Gunung Kidul tidak memosisikan dirinya untuk menggantungkan pada adanya bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah cenderung tidak diperhitungkan dalam ekonomi rumah tangga. Apabila pemerintah memberikan bantuan, kondisi mereka mungkin akan mengalami perubahan. Akan tetapi, bilamana bentuk bantuan dipandang tidak cukup layak, dan mekanisme operasionalisasi bantuan justru mempersulit dalam proses pemanfaatannya, mereka akan mengabaikan bantuan tersebut.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk pedesaan lahan kering mempunyai resistensi dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis ekonomi. Karakter utama

yang mendukung keunggulan perdesaan adalah kemandirian yang ditunjukkan oleh rendahnya derajat ketergantungan terhadap sektor ekonomi, terutama barang-barang yang berasal dari luar daerah serta kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan sendiri. Sebagai akibatnya, sampai pada saat penelitian dilakukan dampak krisis ekonomi belum begitu dirasakan di pedesaan yang berbasis pertanian lahan kering. Sejauh berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, penduduk pedesaan belum menampakkan kecemasan. Penghematan memang dilakukan, tetapi belum terjadi penurunan secara drastis dalam kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok. Penghematan lebih ditujukan pada konsumsi barang-barang sekunder yang tidak begitu diperlukan.

Prospek sektor ekonomi pedesaan lahan kering dapat dibedakan menjadi dua sektor yang bersifat *survivor* dan *inferior*. Sektor yang bersifat *survivor* adalah kegiatan ekonomi yang akan tetap bertahan, meskipun hampir tanpa pertumbuhan, seperti pertanian dan peternakan. Kemudian sektor yang bersifat *inferior* adalah kegiatan ekonomi yang dalam menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan tidak dapat bertahan dan akan banyak mengalami kemunduran seperti sektor industri, perdagangan, dan jasa. Dampak yang dirasa-

kan adalah pada sektor nonekonomi, terutama yang berhubungan dengan aspek pelayanan, seperti kesehatan dan KB, yang miskin kandungan lokal. Kedua sektor ini pada masa depan diperkirakan akan semakin bergeser pada pola tradisional dan swakarsa sebagai alternatif, yang efektifitasnya masih dipertanyakan. Di bidang ketenagakerjaan, sampai saat penelitian dilakukan belum menjadi masalah yang sangat mendesak. Akan tetapi, hal ini akan menjadi masalah yang serius bilamana krisis semakin bertambah buruk dan berkepanjangan dan tidak lagi memberikan kesempatan kerja pada sektor informal di perkotaan.

Dalam upaya menanggulangi berbagai masalah yang sudah dan akan dihadapi sebagai dampak krisis ekonomi, pemerintah telah merespons melalui berbagai program, beberapa di antaranya adalah PDKMK, PDM-DKE, SPSDP, JPKM, JPS, Inpres Dati II, dan lain-lainnya, baik yang bersifat khusus maupun reguler. Tampaknya cukup sulit untuk mengatakan bahwa program-program tersebut telah berhasil dalam menanggulangi dampak krisis ekonomi. Tujuan dan sasaran program yang cukup bagus ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya karena sulitnya mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran. Akurasi data identitas sasaran yang akan ditanggulangi sangat tidak

memadai sehingga program-program tersebut kurang tepat pada sasaran yang diharapkan. Untuk mendapatkan data yang rinci tentang rumah tangga miskin, pekerja terkena PHK, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai identifikasi rumah tangga yang rentan, bukan pekerjaan yang mudah. Banyak kepentingan terselubung yang ada di dalamnya. Yang terjadi di pedesaan lahan kering adalah pendataan dilakukan secara tergesa-gesa dan serentak dengan pemahaman konsep operasional yang berbeda-beda dan cenderung bias untuk kepentingan setiap instansi terkait. Akibat dari pendataan yang kurang akurat sasaran dari program menjadi kurang tepat dan muncul gejala kecemburuan antara yang mendapatkan dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Respons penduduk pedesaan lahan kering terhadap krisis ekonomi dapat dilihat dalam dua bentuk yakni untuk kepentingan individu dan kepentingan umum. Respons untuk kepentingan individu dapat dilihat dari berbagai model penghematan untuk pengeluaran, baik pengeluaran untuk makanan maupun bukan makanan. Respons untuk kepentingan umum terutama terjadi dalam hal sosial kemasyarakatan, seperti perhelatan sosial-budaya yang banyak membutuhkan biaya. Dalam resesi

ekonomi seperti ini penghematan yang biasanya sangat sulit dilakukan justru dapat dilaksanakan tanpa mendapat tantangan dari masyarakat. Bentuk penghematan ini juga terjadi di sektor pertanian dan peternakan, terutama dengan semakin mahalnya biaya/*input* untuk kegiatan tersebut. Bentuk-bentuk cadangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup tampaknya telah disiapkan, baik untuk individu maupun kelompok. Pemilikan aset ternak dan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis, persediaan bahan makan yang dikelola secara individu, dan lumbung desa untuk keperluan kelompok dapat digunakan sebagai jaring pengaman sementara dalam menghadapi krisis ekonomi di daerah lahan kering.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Tulisan ini didasarkan pada penelitian lapangan Dampak Krisis yang dilaksanakan oleh tim dari Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Dwiyanto, Dra. Endang Ediasuti, M.S., Drs. Abdul Haris, M.Si., Drs. Setiadi, M.Si., Dra. Sukamtiningsih, Dra. Wini Tamtiari, dan Drs. Bambang Wicaksono sebagai anggota tim peneliti di daerah lahan kering.

### Referensi

- Chris, Manning. 1998. *Indonesia's economic crisis; note on employment strategies*. Canberra: Australian National University.
- Cole, David C. dan Slade, Betty F. 1998. "Why has Indonesia's financial crisis been so bad?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 24(2): 61-66.
- Dieter, Herbert. 1998. "The role of financial markets and the IMF: the genesis of Asia's financial crisis". *Development and Cooperation* No.5: 8-11
- Evans, Kevin. 1998. "Survey of recent developments". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 34(3): 5-36.
- Johnson, Colin. 1998. "Survey of recent developments". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 34(2): 3-60.
- Ramlli, Rizal. 1986. "Indonesian industry: between goals and reality". *Prisma*, No. 27: 19-35, March.
- Soesastro, Hadi dan M. Chatib Basri. 1998. "Survey of recent developments". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 24(1): 3-54.
- Tukiran, Endang Ediasuti dan Sukamdi. 1998. *Identifikasi pengangguran dati II Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- United Nations Development Programme. 1998. *Employment challenges of the Indonesia economic crisis*. Jakarta: United Nations Development Programme and International Labour Organization.
- White, Benyamin. 1991. *Rural non-farm employment in java: recent developments, policy issues, and research needs*. The Hague. Institute of Social Studies Advisory Service.
- Wirakartakusumah, Djuhari and Akhmad Yani. 1998. *Impact of monetary crisis on unemployment*. Jakarta: Department of Man Power.
- Yogyakarta. Kantor Statistik Propinsi. 1998. *Survai sosial ekonomi nasional 1997*. Yogyakarta.
- — — — —. 1999. *Survai sosial ekonomi nasional 1998*. Yogyakarta.
- — — — —. 1999. *Analisis perkembangan kesejahteraan rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997/1998*. Yogyakarta: kerja sama Kantor Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta dengan UNFPA. (Laporan Sementara)